

## Kerusuhan Massa

### ANALISIS BUDAYA

**ARIEL HERYANTO**

Profesor Emeritus  
dari Universitas Monash, Australia



Kerusuhan besar yang terjadi di banyak kota hampir bersamaan dan sehari-hari biasanya disponsori elite politik negara. Mereka pula yang bisa menghentikan kerusuhan yang disponsori sendiri atau sesamanya. Gambaran umum itu berlaku untuk Indonesia sejak dibasminya hiruk-pikuk politik kerakyatan di akhir tahun 1965. Data dari kerusuhan Mei 1998 menunjukkan bahan peledak bertenaga besar digunakan untuk membakar pusat pertokoan di Jakarta. Amunisi itu hanya dimiliki pasukan tempur milik negara.

Di puncak kejayaan, elite politik biasanya menghendaki kedamaian dan stabilitas politik. Hal ini untuk menjamin stabilitas pertumbuhan ekonomi yang juga mereka kuasai. Dalam situasi lain, mereka tak segan mensponsori kerusuhan massa. Keadaan darurat memberikan ruang gerak ekstra serta dalih bertindak di luar norma dan hukum. Tujuannya mengukuhkan kekuasaan atau menyingkirkan lawan politik.

Kekerasan massal yang meluas dan berkelanjutan tidak bisa diorganisasi sembarang orang. Kalaupun frustasi berat, mayoritas warga tak punya cukup sarana dan keterampilan untuk mengorganisasi kerusuhan besar lintas kota berminggu-minggu. Sejauh mana pembakaran gedung minggu lalu mirip atau berbeda dari kekerasan Mei 1998? Masih terlalu dini untuk dijawab karena terbatasnya data yang teruji.

Massa yang murka minggu lalu bisa melempar batu dan membakar ban bekas. Mereka bisa merusak atau membakar mobil dan merobohkan pagar besi. Tapi, membakar sampai hangus gedung besar di banyak kota?

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

Menjarah rumah pejabat tinggi negara, tanpa dihalangi penegak hukum? Mungkin semua itu kisah lain dengan judul dan tokoh berbeda. Entah siapa dan mengapa.

Walau sering mengeluh soal politik, kelas menengah termasuk kaum yang diuntungkan secara pas-pasan oleh tata sosial yang timpang. Mereka punya alamat jelas, karier profesi terhormat atau kurang terhormat. Walau terbatas, mereka punya akses kesehatan, pendidikan, dan angan-angan hidup lebih sejahtera. Semua itu tidak atau minim dinikmati rakyat paling jelata.

Kerusuhan besar mencemaskan kelas menengah, tetapi tidak bagi elite di kelas teratas ataupun jelata di lapisan masyarakat paling bawah. Dalam situasi genting, elite punya sarana dan dana berlimpah untuk membayar pengawalan berlapis dan istimewa. Jika terpaksa, mereka bisa kabur kapan saja ke mancanegara.

Rakyat paling jelata lebih siap menghadapi kerusuhan yang memorak-porandakan hukum dan norma sosial. Turun-temurun, mereka lahir dan dibesarkan dalam kehidupan yang sudah diporak-porandakan hukum serta tata sosial yang berpihak kepada kaum elite. Eksistensi mereka ibarat timbunan sampah di antara tikus atau kecoa.

Pembakaran gedung atau fasilitas umum bukan selera mereka karena yang tersisa hanya abu dan puing. Wajar seandainya ada di antara kaum jelata yang tergoda menjarah harta kaum elite yang tercecer dari kerusuhan yang disponsori elite negara. Ibarat semut merubung remah-remah makanan yang tumpah dari meja kaum elite, yakni para penjarah raksasa yang menguras harta negara dan sumber alam di Tanah Air.

Mayoritas kelas menengah cenderung konservatif. Ada yang bernafsu naik kelas sosial dengan menjilat elite penguasa. Sebagian berprofesi di lingkungan premanisme. Namun, mayoritas kelas menengah cenderung menolak kerusuhan massal karena lebih banyak terkena getah ketimbang rezekinya. Mereka lebih tertarik pada lowongan kerja dan perbaikan kondisi kerja, perumahan, serta pelayanan publik yang adil dan bertanggung jawab. Sebagian kecil dari mereka rajin menuntut penghormatan hak asasi, penegakan hukum, dan demokrasi beradab.

Gambaran di atas bersifat umum. Perkecualian tentu ada dan kenyataan di lapangan lebih rumit. Gambaran umum itu perlu disimak untuk menimbang ulang pandangan umum bahwa kerusuhan minggu lalu diakibatkan protes massa yang marah. Anggapan serupa tersirat dalam berbagai imbauan agar para demonstran tetap berfokus pada agenda politik dan tidak tergoda melakukan kekerasan mengulang Mei 1998.

Imbauan seperti itu bertolak dari keprihatinan tulus yang layak dihargai. Tapi, kepada siapa selayaknya imbauan itu ditujukan? Salah alamat jika ditujukan kepada aktivis politik yang mengawali protes anti-DPR. Mereka tak punya cukup keterampilan, sarana, dan minat mendorong terulangnya Mei 1998. Fokus mereka lebih tertuju pada perombakan tata politik negara yang ugall-ugalan mengancam kesejahteraan kelas menengah dan masa depan mereka.

Imbauan itu juga bukan untuk kaum jelata. Mereka tak punya sarana dan kuasa membakar kota atau menjarah kecuali yang ikut-ikutan direkrut operator lapangan yang dikirim elite politik. Imbauan itu pasti dicibir elite politik yang terlatih meraup keuntungan dengan mensponsori kerusuhan berkali-kali dalam sejarah negeri ini.

Jurang antara elite dan mayoritas rakyat teramat lebar. Wilayah huni, tempat dan gaya hidup mereka bagai bumi dan langit. Juga akses pendidikan dan kesehatan berkualitas. Ketika ada tokoh elite menuding kaum demonstran didukung "kekuatan asing", mungkin yang dimaksud adalah "kekuatan rakyat". Maklum, elite sudah terasing dari kehidupan mayoritas warga bangsa ini.

Elite politik tidak harus peduli pada kepentingan atau tuntutan masyarakat sebangsa. Berpuluh tahun mereka tidak butuh dukungan rakyat, kecuali lima tahun sekali pada hari pemilihan umum. Mereka bergantung pada hasil negosiasi dengan sesama elite dalam membuat keputusan politik. Hasilnya disahkan elite hukum dan diamankan elite aparat bersenjata.

Warga elite saling bersaing, tetapi dalam ruang eksklusif di negeri tanpa oposisi. Selama ruang eksklusif itu aman, protes dari masyarakat tidak perlu mereka khawatirkan. Tidak perlu ada yang ditembak polisi, apalagi melibatkan tentara. Jika murka massa dirasa mengusik, kompromi basa-basi disiapkan. Misalnya, sanksi individual pada pejabat atau membatalkan kebijakan konyol.

Akan tetapi, ancaman serius tidak datang dari bawah. Sejarah penuh contoh ambruknya kekuasaan besar berasal dari perpecahan elite. Di saat krisis elite terkuak, murka massa dari bawah berpeluang menggenapi perubahan.